

DAMPAK KONFLIK KELUARGA TERHADAP KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS ANAK PRASEKOLAH

Sabrina Ais Zahra¹, Sofiatun Anisa², Rahmi Anekasari³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan,
Indonesia

¹sabrina.ais.zahra24018@mhs.uingusdur.ac.id,

²sofiatun.anisa24022@mhs.uingusdur.ac.id, ³rahmi.anekasari@uingusdur.ac.id

ABSTRACT

Family conflict is a fairly common phenomenon that can affect children's lives, particularly in mental and emotional aspects. This study aims to identify the causes of family conflict, its impact on young children, and the role of the Child Protection Agency in assisting with its management. This study employs a qualitative method using a literature review approach sourced from various books and scientific journals. The findings indicate that family conflicts can be triggered by ineffective communication, differing perspectives, economic issues, and the involvement of third parties. Ongoing conflicts can cause children to feel insecure, experience anxiety, suffer from reduced self-confidence, and face difficulties in social interaction. Furthermore, a dysfunctional family environment also influences the process of a child's personality development from an early age. In this context, the Child Protection Agency plays a crucial role in providing guidance, protection, and support for the child's psychological recovery. However, its implementation still faces various challenges, necessitating collaboration among various stakeholders to support children's well-being.

Keywords: Family Conflict, Child Psychological Development, Child Protection Agency

ABSTRAK

Konflik keluarga merupakan fenomena yang cukup umum dan dapat memengaruhi kehidupan anak-anak, khususnya dalam aspek mental dan emosional. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab konflik keluarga, dampaknya terhadap anak usia dini, dan peran Lembaga Perlindungan Anak dalam membantu penanganannya. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka yang bersumber dari berbagai buku dan jurnal ilmiah. Temuan menunjukkan bahwa konflik keluarga dapat dipicu oleh komunikasi yang tidak efektif, perbedaan perspektif, masalah ekonomi, dan keterlibatan pihak ketiga. Konflik yang berkelanjutan dapat menyebabkan anak merasa tidak aman, mengalami kecemasan, menderita penurunan kepercayaan diri, dan menghadapi kesulitan dalam interaksi sosial. Lebih lanjut, lingkungan keluarga yang disfungsi juga memengaruhi proses perkembangan kepribadian anak sejak usia dini. Dalam konteks ini, Lembaga Perlindungan Anak memainkan peran penting dalam memberikan bimbingan, perlindungan, dan dukungan untuk pemulihan psikologis anak. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga memerlukan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung kesejahteraan anak.

Kata Kunci: Konflik Keluarga, Perkembangan Psikologis Anak, Badan Perlindungan Anak

A. Pendahuluan

Keluarga adalah lingkungan pertama anak untuk mempelajari berbagai hal yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Dalam proses pembelajaran ini, anak akan meniru apa yang diajarkan dan dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Perilaku keluarga, khususnya perilaku orang tua dalam menerapkan gaya pengasuhan terhadap anak, akan memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama dalam membentuk kepribadian anak. Apakah kepribadian anak berkembang secara positif atau tidak bergantung pada gaya pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua mereka. Namun, ketika konflik muncul, mereka tidak dapat memenuhi peran mereka secara efektif. Mereka juga menunjukkan perilaku pasif dan tidak responsif terhadap ajakan bermain (Kurniawan dkk., 2023).

Konflik rumah tangga merupakan fenomena yang tidak jarang terjadi dalam kehidupan keluarga. Konflik yang tidak diselesaikan dengan baik dapat berdampak negatif tidak hanya pada pasangan suami istri tetapi juga pada anak-anak yang menyaksikan atau bahkan menjadi korban

emosional dari perselisihan tersebut. Dalam konteks ini, pendekatan psikoanalitik dan perspektif Islam menawarkan wawasan yang saling melengkapi untuk memahami dampak konflik terhadap perkembangan mental anak (Bastian dkk., 2025).

Dalam hal ini, lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah Badan Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) (Arfika, 2025). Badan Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) adalah organisasi independen yang didedikasikan untuk perlindungan anak. Lembaga ini terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan memiliki dewan direksi yang disetujui melalui Keputusan Menteri dari Kementerian Sosial. LPAI didirikan untuk melindungi hak-hak anak, dengan misi untuk memberikan pencegahan, pengembangan, dan dukungan sehingga pertumbuhan, perkembangan, dan kehidupan anak mencapai kondisi optimal (Mochammad Omarsyah, 2024).

Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan beberapa dampak negatif yang dapat timbul dari konflik orang tua dan bagaimana mengatasi masalah ini untuk melindungi kesejahteraan psikologis anak. Isu-isu

yang dibahas dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana gaya pengasuhan memengaruhi anak, dan bagaimana melindungi anak-anak yang menjadi korban pengasuhan bermasalah akibat konflik orang tua atau keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan mengevaluasi kebijakan terkait perlindungan anak-anak yang menjadi korban pengasuhan bermasalah akibat konflik orang tua atau keluarga.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tinjauan pustaka untuk secara menyeluruh mengkaji bagaimana konflik orang tua memengaruhi kesehatan mental anak-anak usia dini, serta upaya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam proses pemulihan psikologis anak. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang lebih bersifat deskriptif dan biasanya melibatkan analisis (Azizah & Suryadi, 2025). Menurut Creswell, tinjauan pustaka berfungsi sebagai dasar untuk membangun kerangka teoritis atau konseptual untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan, serta membantu memetakan apa yang telah dipelajari dan apa yang masih perlu diteliti.

Sumber data utama untuk penelitian ini—buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas kesehatan mental anak, konflik rumah tangga, dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA)—juga digunakan untuk memperkaya analisis (Fahmi, 2025). Ada beberapa tahapan dalam penelitian ini:

Menentukan Fokus Topik:

Langkah pertama dalam tinjauan pustaka adalah menentukan fokus spesifik dari topik yang akan dibahas. Dalam hal ini, topiknya berfokus pada ketahanan anak dalam menghadapi perselisihan keluarga. Peneliti membatasi studi pada dinamika keluarga yang disfungsional dan ketahanan sebagai mekanisme pertahanan psikologis pada anak, serta strategi yang digunakan oleh lembaga perlindungan anak untuk membantu anak-anak dalam konflik tersebut. Topik ini relevan karena dinamika keluarga yang disfungsional, seperti konflik rumah tangga, dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis anak-anak usia muda.

Penelusuran Literatur yang

Relevan: Pada tahap ini, peneliti melakukan penelusuran literatur yang relevan, mengidentifikasi sekitar 20 sumber dari berbagai sumber akademis, termasuk jurnal ilmiah dan

laporan penelitian. Penelusuran dilakukan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan topik, seperti “konflik rumah tangga,” “psikologi anak,” dan “lembaga perlindungan anak.” Peneliti mencari literatur yang membahas dampak keluarga disfungsional terhadap psikologi anak.

Evaluasi Sumber Literatur:

Setelah literatur dikumpulkan, peneliti berfokus pada pemahaman konteks keluarga disfungsional. Peneliti mengidentifikasi berbagai jenis konflik rumah tangga yang ditemukan dalam literatur.

Analisis Upaya LPA dalam Konteks Keluarga Disfungsional:
Setelah mengumpulkan literatur, peneliti memfokuskan perhatian pada tantangan yang harus dihadapi LPA dalam konteks keluarga disfungsional.

Integrasi Studi Sebelumnya:
Peneliti kemudian mengumpulkan data dari hasil studi jurnal sebelumnya. Pengumpulan ini melibatkan pengorganisasian temuan penelitian yang menunjukkan bagaimana intervensi LPA membantu anak-anak mengatasi konflik keluarga. Peneliti juga mencatat temuan yang menunjukkan bahwa meskipun anak-anak dari keluarga disfungsional dapat menunjukkan

ketahanan, keberhasilan mereka dalam beradaptasi sangat bergantung pada berbagai faktor eksternal, termasuk dukungan dari sumber eksternal seperti komunitas dan sekolah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Penyebab Utama Konflik Keluarga

Konflik domestik adalah kondisi dalam keluarga yang ditandai dengan perbedaan pendapat, ketidakcocokan, atau konflik di antara anggota keluarga, khususnya antara suami dan istri. Kondisi ini dapat berdampak negatif pada kualitas hubungan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Konflik semacam itu dapat bervariasi dalam intensitas dan durasinya serta mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti aspek emosional, fisik, ekonomi, dan spiritual (Fahmi, 2025). Menurut Thomas Santoso, penyebab utama konflik meliputi faktor-faktor berikut:

a. Struktur Grup

Struktur ini mencakup ukuran kelompok, tingkat spesialisasi tugas di antara anggota, kejelasan area kerja, keselarasan tujuan individu dengan tujuan kelompok, gaya kepemimpinan, sistem penghargaan,

dan tingkat saling ketergantungan antar kelompok. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran kelompok yang besar dan tingkat spesialisasi tugas yang tinggi cenderung memicu konflik.

b. Faktor Pribadi

Faktor-faktor ini meliputi sistem nilai individu dan ciri kepribadian unik yang membedakan satu orang dari orang lain. Dalam hubungan pernikahan, perbedaan ini dapat menimbulkan konflik yang dirasakan. Jika disertai dengan emosi seperti kecemasan, ketegangan, frustrasi, atau permusuhan, persepsi ini berkembang menjadi konflik yang dirasakan.

c. Komunikasi yang Buruk

Komunikasi yang buruk antara suami dan istri seringkali menyebabkan kesalahpahaman yang berujung pada konflik. Penelitian menunjukkan bahwa berbagai hambatan, seperti perbedaan pemahaman semantik, kurangnya pertukaran informasi, dan gangguan dalam proses penyampaian pesan, dapat memperburuk situasi.

d. Perbedaan Individu

Jenis konflik ini melibatkan perbedaan pendapat dan perasaan antar individu. Setiap orang unik, dan

karenanya memiliki perspektif dan perasaan yang berbeda satu sama lain. Perbedaan-perbedaan ini, baik mengenai suatu masalah tertentu maupun lingkungan yang mereka hadapi, dapat menjadi salah satu penyebab konflik dalam kehidupan sosial.

e. Perbedaan Latar Belakang Budaya

Latar belakang budaya membentuk pola pikir dan sikap yang berbeda; setiap orang, secara langsung maupun tidak langsung, dipengaruhi oleh pola pikir dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompoknya. Perbedaan-perbedaan ini pada akhirnya menimbulkan variasi sikap dan pendirian di antara individu yang berpotensi memicu konflik.

f. Perbedaan Kepentingan

Individu atau kelompok seringkali memiliki kepentingan yang bertentangan karena perbedaan perasaan, perspektif, dan latar belakang budaya. Bahkan tindakan yang serupa pun dapat didasarkan pada motif yang berbeda antara suami dan istri.

g. Perubahan Nilai yang Cepat

Perubahan mendadak dalam nilai-nilai masyarakat dapat memicu konflik sosial, meskipun perubahan tersebut

pada dasarnya merupakan kejadian alami. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa konflik muncul karena perbedaan budaya, perubahan nilai yang cepat, dan perbedaan perspektif serta perasaan individu. Hal ini sering terjadi karena individu tidak selalu selaras dengan kelompoknya dalam hubungan sosial (Badrudin, 2024).

Selain itu, ada beberapa faktor lain yang berkontribusi terhadap konflik dalam rumah tangga, termasuk hal-hal berikut. Pertama, kehadiran pihak ketiga atau perselingkuhan. Perselingkuhan dapat diartikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap pasangan, yang tidak hanya menghancurkan kepercayaan tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama (Subangkit, 2021). Kedua, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang merujuk pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh satu pasangan terhadap pasangan lainnya. Misalnya, selama pertengkaran, salah satu pihak dapat melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan cedera pada korban. Ketiga, campur tangan orang tua dalam masalah perkawinan anak-anak mereka. Keterlibatan orang tua yang berlebihan dalam urusan

perkawinan anak-anak mereka dapat memicu konflik dan bahkan berkontribusi pada tingginya angka perceraian.

Dari perspektif Islam, orang tua disarankan untuk memberikan bimbingan daripada secara langsung ikut campur dalam urusan perkawinan anak-anak mereka. Keempat, masalah ekonomi atau keuangan, yang seringkali menjadi sumber konflik. Masalah-masalah ini dapat muncul, misalnya, ketika ada ketidakseimbangan pendapatan antara suami dan istri, atau ketika salah satu pihak gagal memenuhi tanggung jawab ekonominya, sehingga mengakibatkan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Kelima, kurangnya komunikasi antar pasangan, yang berdampak pada penurunan keharmonisan keluarga. Frekuensi pertemuan yang rendah dan interaksi yang minim juga dapat meningkatkan potensi konflik dalam rumah tangga (Amato, 2010).

Dampak pada Kesehatan Mental Anak

Dampak konflik antara orang tua dan anak tidak hanya terjadi pada masa kanak-kanak awal, tetapi dapat berlanjut hingga masa remaja dan bahkan dewasa jika tidak ditangani

dengan benar. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh konflik menghadapi risiko lebih tinggi untuk mengembangkan gangguan psikologis, seperti kecemasan, depresi, gangguan keterikatan, dan kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Selain itu, mereka lebih cenderung terlibat dalam perilaku menyimpang sebagai bentuk pelarian dari stres emosional yang belum terselesaikan sejak masa kanak-kanak. Kondisi emosional yang tidak stabil dalam keluarga juga dapat menghambat kemampuan anak untuk berkonsentrasi, yang menyebabkan penurunan prestasi akademik dan gangguan perkembangan pribadi di sekolah.

Dari perspektif psikoanalitik yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, masa kanak-kanak dipandang sebagai fase penting dalam pembentukan struktur kepribadian individu. Oleh karena itu, lingkungan keluarga yang ditandai dengan ketidakharmonisan dan konflik berpotensi menyebabkan trauma psikologis jangka panjang. Konflik dalam rumah tangga, baik berupa pertengkaran, pelecehan verbal, atau kekerasan fisik, dapat menanamkan

rasa takut dan ketidakpastian pada anak-anak. Jika anak-anak terus-menerus terpapar atau bahkan menjadi korban konflik semacam itu, mereka cenderung mengalami kecemasan, rendah diri, dan perasaan tidak aman. Menurut teori Freud, kondisi ini terkait dengan gangguan keseimbangan perkembangan ego, yang bertindak sebagai mediator antara dorongan naluriah (id) dan nilai-nilai moral (superego). Tekanan lingkungan yang berlebihan dapat melemahkan fungsi ego, sehingga menyulitkan anak-anak untuk mengendalikan diri dan menyesuaikan perilaku mereka dengan tepat. Akibatnya, anak-anak dapat berkembang menjadi individu yang agresif, cenderung menarik diri dari lingkungan sosial mereka, atau menghadapi hambatan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat.

Ketika konflik rumah tangga terjadi, terutama yang melibatkan kekerasan atau ketegangan emosional yang tinggi, anak-anak akan merasakan dampaknya baik secara langsung maupun jangka panjang. Dari perspektif Islam, dampak-dampak ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hilangnya Rasa Aman dan Munculnya Kecemasan

Salah satu dampak utama konflik keluarga terhadap kesehatan mental anak adalah hilangnya rasa aman. Dalam keluarga yang harmonis, seorang anak seharusnya merasa terlindungi, dicintai, dan tenteram. Namun, konflik yang berkelanjutan dapat menyebabkan perasaan cemas, takut, dan tidak nyaman. Dalam ajaran Islam, orang tua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan fisik dan emosional anak-anak mereka; oleh karena itu, konflik yang berkepanjangan bertentangan dengan prinsip ini.

b. Gangguan dalam Perkembangan Kepribadian dan Identitas Diri

Keluarga memainkan peran penting dalam proses pembentukan kepribadian dan identitas anak. Dari perspektif Islam, lingkungan keluarga berfungsi sebagai tempat utama untuk menanamkan nilai-nilai dan karakter. Jika seorang anak tumbuh dalam situasi yang ditandai dengan konflik dan ketegangan emosional, proses perkembangan kepribadian dapat terganggu. Akibatnya, anak tersebut mungkin mengalami kebingungan dalam mengenali dan mengembangkan identitas diri yang

sehat, dengan efek yang dapat berlanjut hingga dewasa.

c. Stigma Sosial dan Pola Hubungan

Tidak Sehat di Masa Depan Konflik rumah tangga yang terus-menerus dapat menyebabkan anak-anak merasa terasing atau terisolasi dari lingkungan sosial mereka. Selain itu, anak-anak mungkin mengembangkan perilaku yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Dari perspektif Islam, orang tua harus menjadi teladan dalam membangun hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Namun, jika anak-anak terbiasa menyaksikan konflik, mereka mungkin menganggap pertengkaran sebagai bagian normal dari hubungan. Hal ini berisiko mempersulit anak-anak untuk membangun hubungan interpersonal yang sehat di masa depan.

d. Penurunan Kepercayaan Diri dan Harga Diri

Lingkungan keluarga yang penuh konflik dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis anak, khususnya terkait kepercayaan diri dan harga diri. Anak-anak yang sering terpapar konflik cenderung merasa tidak dihargai, diabaikan, atau bahkan tidak dicintai. Hal ini dapat mengurangi persepsi diri positif

mereka. Dalam ajaran Islam, setiap anak memiliki martabat yang harus dijaga dan dihormati. Oleh karena itu, orang tua perlu memberikan pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan akademis tetapi juga pada nilai-nilai kasih sayang, penghargaan, dan rasa hormat kepada anak (Bastian dkk., 2025).

Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Intervensi Psikologis

Konflik keluarga, seperti perceraian atau hubungan orang tua yang tegang, dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan anak, terutama dalam proses pengasuhan. Stres psikologis yang dialami anak-anak akibat situasi tersebut berpotensi memengaruhi perkembangan emosional dan psikologis mereka. Anak-anak dalam lingkungan keluarga yang penuh konflik lebih cenderung mengalami gangguan psikologis, seperti kecemasan, depresi, dan kesulitan tidur. Selain itu, situasi ini seringkali membuat anak-anak merasa bingung dan terjebak di tengah konflik orang tua mereka, sehingga meningkatkan tingkat stres dan mengurangi rasa aman mereka (Kurniawan dkk., 2023).

Prinsip Kepentingan Terbaik Anak menjadi landasan utama dalam setiap proses pengambilan keputusan yang melibatkan anak, termasuk dalam penyelesaian sengketa hak asuh dan upaya melindungi anak dari dampak negatif konflik keluarga.

Untuk mendukung hal ini, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) didirikan pada tahun 1997 untuk mempromosikan, mengadvokasi, dan memberikan dukungan terkait pemenuhan hak-hak anak. Dukungan psikososial yang diberikan memainkan peran penting dalam membantu memulihkan kesejahteraan mental dan emosional anak, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan situasi baru setelah perceraian orang tua mereka. Secara berkelanjutan, LPAI melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak-hak anak dan memastikan kepentingan terbaik mereka di Indonesia. Selain itu, LPAI berkolaborasi dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) regional yang tersebar di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia (Arfika, 2025).

Kerangka hukum di Indonesia telah memberikan landasan yang cukup kuat bagi upaya perlindungan

hak-hak anak. Perlindungan anak didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan yang bertujuan untuk memastikan dan melindungi hak-hak anak, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Kementerian Negara Sekretariat, 2014). Undang-undang tersebut mendefinisikan anak sebagai setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Peraturan ini juga mencakup prinsip-prinsip dasar, salah satunya adalah kepentingan terbaik anak, yang menjadi pedoman utama dalam menentukan hak asuh dan memenuhi kebutuhan anak, khususnya setelah perceraian (Herlina Puji Astuti, Ellya Susilowati, 2022).

Selain itu, negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan

memenuhi hak-hak anak tanpa diskriminasi, baik berdasarkan etnis, agama, ras, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Namun, dalam praktiknya, Badan Perlindungan Anak (LPA) masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya termasuk penerimaan publik yang tidak merata terhadap kampanye kesadaran, kurangnya konsistensi di antara petugas penegak hukum dalam menerapkan hukum karena fokus yang terus menerus pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan kendala pendanaan yang diakibatkan oleh ketergantungan pada sponsor.

Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya adalah penerimaan publik yang tidak merata terhadap kampanye kesadaran, kurangnya konsistensi di antara aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum karena fokus mereka yang terus menerus pada KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana), dan keterbatasan pendanaan akibat ketergantungan pada sponsor. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, LPA terus melakukan kampanye kesadaran publik yang luas

dan berkelanjutan mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak (Mochammad Omarsyah, 2024).

Salah satu hambatan utama dalam upaya perlindungan anak adalah masih rendahnya pemahaman orang tua mengenai hak-hak anak, khususnya yang berkaitan dengan aspek psikologis dan emosional. Dalam berbagai sengketa hak asuh, banyak orang tua belum sepenuhnya menyadari bahwa konflik keluarga yang mereka alami dapat berdampak traumatis pada anak-anak. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa hak asuh yang berkepanjangan menimbulkan masalah serius. Proses hukum yang berkepanjangan tidak hanya menghambat kepastian hukum tetapi juga berpotensi memperburuk kondisi psikologis anak-anak yang terlibat. Di sisi lain, praktik disiplin terhadap anak yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak semakin memperburuk situasi. Masih ada orang tua yang, dengan dalih mendidik atau menanamkan disiplin, sebenarnya melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai

kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Hal ini menyoroti perlunya peningkatan pemahaman dan kesadaran orang tua mengenai praktik pengasuhan yang lebih tepat yang memprioritaskan kepentingan terbaik anak (Kurniawan dkk., 2023).

Lembaga perlindungan anak memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap anak menerima perawatan yang sesuai dengan usia dan kebutuhannya, termasuk melalui layanan rehabilitasi, konseling, dan pendidikan (Irawan, 2021). Oleh karena itu, pemenuhan hak, perlindungan, dan kesejahteraan anak harus diprioritaskan untuk mencegah dan menangani secara tepat setiap tindakan yang dapat membahayakan anak (Fae & Rahaditya, 2024). Akibatnya, semua kebijakan dan keputusan hukum harus memastikan bahwa semua anak—terutama mereka yang berada dalam situasi konflik keluarga—menerima perlindungan yang adil, merata, dan berdasarkan kebutuhan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial, yang menekankan pentingnya memberikan perhatian dan perlindungan yang lebih besar kepada mereka yang berada dalam kondisi paling rentan.

Upaya Pemulihan yang Tepat dalam Konflik Keluarga

Menangani masalah keluarga membutuhkan komunikasi yang efektif dan pendekatan yang tepat. Salah satu langkah penting adalah memilih waktu yang tepat untuk berdiskusi, memastikan setiap anggota keluarga siap secara emosional dan dapat berbicara dengan tenang tanpa terpengaruh oleh emosi sesaat. Kejujuran dan keterbukaan dalam mengungkapkan perasaan, pikiran, dan kebutuhan juga penting untuk membangun kepercayaan dan menumbuhkan saling pengertian. Selain itu, kemampuan untuk mendengarkan secara aktif dan dengan empati adalah kunci untuk memahami perspektif setiap anggota keluarga, sehingga mencegah kesalahpahaman. Komunikasi yang efektif juga harus disertai dengan rasa saling menghormati, menghindari saling menyalahkan, dan menjaga kesopanan berbahasa. Setelah itu, keluarga harus bekerja sama untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak melalui diskusi dan kesepakatan bersama.

Dengan komunikasi yang terbuka dan jujur yang didasarkan pada rasa saling menghormati, konflik

dapat diselesaikan dengan lebih bijaksana, menumbuhkan lingkungan keluarga yang harmonis dan aman yang mendukung kesejahteraan setiap anggota.

Selain komunikasi, terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah keluarga, seperti pendekatan psikodinamik, yang menekankan pemahaman penyebab masalah; pendekatan perilaku, yang berfokus pada perubahan perilaku; dan pendekatan Gestalt, yang memandang individu secara holistik. Pendekatan konseling juga dapat membantu melalui proses komunikasi yang berkelanjutan, sementara pendekatan keagamaan memberikan kekuatan melalui nilai-nilai spiritual.

Upaya untuk menyelesaikan konflik keluarga juga membutuhkan kesadaran dan komitmen dari setiap anggota keluarga, dan dukungan dari lingkungan eksternal—seperti sekolah—memainkan peran penting. Guru dan konselor dapat berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Program intervensi berbasis sekolah, seperti kelompok dukungan, dapat berfungsi sebagai ruang bagi anak-anak untuk

berbagi pengalaman dan menerima dukungan sosial dari teman sebaya.

Selain itu, orang tua perlu mendapatkan pendidikan tentang manajemen konflik dan praktik pengasuhan yang sehat untuk mendukung kesehatan mental anak-anak mereka. Pada akhirnya, setiap keluarga menghadapi keadaan yang unik, sehingga hal terpenting adalah komitmen untuk terus meningkatkan diri, menjaga hubungan, dan melakukan refleksi diri untuk membina hubungan yang lebih sehat dan kehidupan yang lebih baik (Erik dkk., 2025).

D. Kesimpulan

Konflik keluarga adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti komunikasi yang tidak efektif, perbedaan kepribadian individu, latar belakang budaya, dan kondisi ekonomi. Konflik yang tidak ditangani dengan tepat dapat mengganggu keharmonisan keluarga dan berdampak negatif pada perkembangan anak. Anak-anak yang hidup dalam lingkungan keluarga yang penuh konflik berisiko mengalami gangguan psikologis, seperti kecemasan, perasaan tidak aman, rendah diri, dan kesulitan

dalam membangun hubungan sosial dengan orang-orang di sekitar mereka. Kondisi ini juga dapat memengaruhi pembentukan kepribadian anak sejak usia dini dan dikhawatirkan akan berlanjut hingga perkembangan mereka di masa depan.

Dalam menangani masalah-masalah ini, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan, dukungan, dan membantu pemulihan psikologis anak. Namun, pelaksanaan peran-peran ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara orang tua, masyarakat, dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan keluarga yang lebih harmonis dan memprioritaskan kepentingan terbaik anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal .

DAFTAR PUSTAKA

Arfika, SE (2025). *Mengoptimalkan Peran Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (Lpai) dalam Menangani dan Mencegah Kejahatan Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur*. Tesis.

- Azizah, M., & Suryadi. (2025). Dampak Konflik Orang Tua terhadap Kesehatan Mental Anak Usia Dini. *DUNIA ANAK: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 08(01).
- Badruduin, DG (2024). Penyebab Konflik Tidak Harmonis dalam Keluarga Menurut Al-Qur'an. *Jurnal Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1).
- Bastian, MB, Quthny, AYA, & Hariati, NA (2025). DAMPAK KONFLIK DOMESTIK TERHADAP KESEHATAN MENTAL ANAK DARI PERSPEKTIF PSIKOANALITIK DAN ISLAM DI KOMUNITAS MOJOLEGI. *JURISY: Jurnal Studi Syariah*, 5(1).
- Erik, BS, Afriliani, & Syam, H. (2025). Masalah Keluarga dan Solusi untuk Pengelolaannya. *Jurnal Ilmu Akademik Multidisiplin*, 2(4).
- Fae, MO, & Rahaditya, R. (2024). Upaya Badan Perlindungan Anak Indonesia untuk Melindungi Anak Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Hukum Unes*, 6(3).
- Fahmi, NN (2025). Dampak Konflik Rumah Tangga terhadap Kesehatan Mental Anak dari Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Pendidikan*, 3(4).
- Herlina Puji Astuti, Ellya Susilowati, DAN (2022). *PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK KORBAN KONFLIK DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN ANAK KABUPATEN DEMAK*.
- Kurniawan, A., Fauziah, A., Mubarak, FF, Sivanni, N., & Rizki, R. (2023). Perlindungan Anak Korban Pengasuhan Bermasalah Akibat Konflik Orang Tua atau Keluarga di Kota Bandung. *Jurnal Studi Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.30999/jph.v5i2.2516>
- Omarsyah, T., & Hendrawati, TM (2024). Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak-Hak Anak Pelaku Tindak Pidana (Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur). *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Sanskara*, 3(02), 5. <https://doi.org/10.58812/shh.v3.i02>